

**Judul** : Diutarakan Puteri Komarudin di depan parlemen dunia: saat pandemi corona DPR tetap jalankan tugas pengawasan  
**Tanggal** : Senin, 13 Juli 2020  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Di Depan Parlemen Dunia Saat Pandemi Corona DPR Tetap Jalankan Tugas Pengawasan



**Puteri Anetta Komarudin**

Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerjasama dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) menyelenggarakan Seminar Daring bertajuk Peran Parlemen dalam Pengawasan Anggaran Respons Covid-19, Rabu (8/7).

Seminar ini mendiskusikan tantangan bagi parlemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan di tengah masa pandemi. Sebagai panelis perwakilan parlemen Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin menyampaikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam menjamin akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan anggaran negara untuk penanganan krisis akibat pandemi Covid-19.

Seminar dibuka oleh Ketua BKSAP DPR Fadli Zon yang dilanjutkan dengan sesi paparan panelis masing-masing negara. Selain perwakilan parlemen Indonesia, seminar juga dihadiri oleh James Wild (Anggota Parlemen Inggris), Geordin Gwyn Hill-Lewis (Anggota Parlemen Afrika Selatan), dan Inaya Ezeedine (Anggota Parlemen Lebanon).

"Meski di tengah pandemi, DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan baik melalui konferensi video

maupun pertemuan rapat secara fisik, untuk membahas kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19," jelas Puteri.

Sementara di Komisi XI DPR (bidang keuangan) tempat Puteri bertugas, dirinya terus berupaya memastikan bahwa manfaat dari setiap program yang dilaksanakan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Di saat yang sama, kita juga memastikan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan dengan akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Puteri.

Pandemi Covid-19 yang dimulai dengan krisis kesehatan masyarakat turut menyebabkan semakin landainya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Puteri pun mendiskusikan bagaimana berbagai fasilitas dan insentif yang pemerintah salurkan dapat bermanfaat ganda. Yaitu tidak hanya menyelamatkan kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak pandemic. Tapi juga dapat mendukung pemberdayaan pengusaha perempuan.

"Untuk menjaga produktivitas UMKM, pemerintah telah menetapkan berbagai stimulus fiskal. Sedangkan dalam hal sisi konsumsi, kami juga telah mendorong pemerintah untuk melibatkan peran UMKM dalam belanja pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga," ujar Puteri.

Lebih lanjut, sebagaimana yang disebutkan Fadli Zon dalam pidato pembukaannya, tantangan bagi parlemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran di saat pandemi adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi masyarakat.

Senada, Puteri juga menyoroti mekanisme pengawasan dan evaluasi atas proses pengadaan untuk penanganan Covid-19. ■ KAL